



SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2020

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PERSEDIAAN OBAT

Edwar Setiawan¹
Chofiuddin Muchlis²

^{1,2}Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Email : setiawanedwar6@gmail.com, chofiuddin.muchlis@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Sejauhmana penerapan sistem pengendalian internal terhadap persediaan obat; 2) Mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya persediaan obat yang kurang; 3) Sejauhmana sistem pengendalian internal terhadap persediaan obat untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi kekurangan obat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan data yang didapat dianalisis dengan 1) mengumpulkan data; 2) reduksi data; 3) penyajian data; 4) menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) sistem pengendalian internal dalam mencegah kekurangan obat berjalan dengan baik, sudah diterapkannya unsur-unsur pengendalian internal dari Lingkungan Pengendalian, Penentuan Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pengawasan; 2) faktor-faktor yang menyebabkan ketersediaan obat kurang mulai dari tidak kompetennya pengurus di bagian farmasi, kurangnya rasa tanggungjawab, tidak dimintainya jaminan, lemahnya pengurus dalam menganalisis persediaan obat, kurangnya koordinasi antara puskesmas dan Dinas kesehatan. sedangkan dari pihak Puskesmas yaitu karakter yang kurang baik, usahanya gulung tikar; 3) Sistem persediaan obat dalam mencegah kekurangan obat sudah diterapkannya analisis sistem persediaan obat terlebih dahulu sebelum memberikan pesanan, dimintai persyaratan dan juga harus mengisi Surat Permohonan Pemesanan yang sudah disediakan oleh pengurus Dinas Kesehatan.

Kata Kunci: *Pengendalian internal, persediaan obat*

Abstract

This study aims to determine 1) The extent to which the internal control system is applied to drug supplies; 2) Knowing the factors that cause the lack of drug supplies; 3) To what extent is the internal control system for drug supplies to prevent drug shortages. This research uses qualitative methods with a descriptive approach. Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation, and the data obtained were analyzed by 1) collecting data; 2) data reduction; 3) data presentation; 4) draw conclusions. The results show that 1) the internal control system in preventing drug shortages is running well, elements of internal control from the Control Environment, Risk Determination, Control Activities, Information and Communication and Supervision have been implemented; 2) The factors that cause the availability of drugs are less, starting from the incompetence of the management in the pharmacy department, lack of responsibility, not asking for guarantees, weakness of administrators in analyzing drug supplies, lack of coordination between puskesmas and health offices. whereas from the Puskesmas side, the character is not good enough, the business is out of business; 3) The drug supply system in preventing drug shortages has implemented a drug supply system analysis before placing an order, is asked for requirements and must also fill in the Request for Order that has been provided by the management of the Health Office.

Keywords: *Internal control, drug supply*



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2020**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten atau kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Puskesmas juga merupakan salah satu sarana kesehatan atau tempat menyelenggarakan upaya kesehatan dengan memberdayakan berbagai kesatuan personel terlatih dan terdidik dalam menghadapi dan menangani masalah medik untuk pemulihan dan pemeliharaan kesehatan yang baik.

Kegiatan utama puskesmas adalah menjual jasa perawatan, namun perawatan terhadap pasien tidak akan maksimal jika persediaan obat yang dimiliki puskesmas tersebut tidak lengkap. Persediaan obat dalam puskesmas memiliki arti yang sangat penting karena persediaan obat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan sebuah puskesmas. Oleh karena itu, perlakuan akuntansi persediaan obat yang harus diterapkan oleh pihak puskesmas untuk membantu kelancaran dalam kegiatan operasionalnya. Tanpa adanya persediaan, puskesmas dihadapkan pada resiko karena tidak dapat memenuhi kebutuhan para pengguna jasa puskesmas (pasien). Pengelolaan persediaan obat dimulai dari pembelian, penyimpanan (gudang), prosedur permintaan dan pengeluaran barang, sampai ke sistem perhitungan fisik dan prosedur pemusnahan persediaan obat.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2014:PSAK No.14) Persediaan adalah aset 1). Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. 2). Dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan. 3). Dalam bentuk bahan atau perlengkapan (*supplies*) untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Persediaan sangat rentan terhadap kerusakan maupun pencurian. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian intern yang bertujuan melindungi persediaan obat tersebut dan juga agar informasi mengenai persediaan lebih dapat dipercaya. Pengendalian intern persediaan dapat dilakukan dengan melakukan tindakan pengamanan untuk mencegah terjadinya kerusakan, pencurian, maupun tindakan penyimpangan lainnya. Kerusakan,

penyimpanan yang tidak benar, lalai dalam pencatatan dan semua kemungkinan lainnya yang ada digudang.

Untuk menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan dalam pengelolaan persediaan obat, harus ada pengendalian internal yang dijalankan secara baik oleh pihak PUSKESMAS. Adapun yang dimaksud pengendalian internal menurut Mulyadi (2013:164) Pengertian pengendalian intern menurut Mulyadi adalah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Perusahaan harus memperhatikan sistem pengendalian intern untuk mengetahui apakah karyawan telah menjalankan strategi atau prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Karena tanpa adanya sistem pengendalian intern suatu organisasi tidak akan terstruktur dengan baik, begitupun dengan karyawan bagian persediaan obat di puskesmas, tanpa adanya sistem pengendalian intern persediaan obat tidak akan terevaluasi dengan benar. Jadi perusahaan harus menjalankan pengendalian intern untuk tercapainya tujuan perusahaan.

Di kutip dari DETIK.COM Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mojokerto mengevaluasi manajemen obat-obatan di Puskesmas Jetis pasca adanya pasien yang menerima salep kedaluwarsa. Mereka menilai kasus ini terjadi akibat adanya pelanggaran prosedur pengelolaan obat di puskesmas tersebut.

Kepala Dinkes (Kadinkes) Kabupaten Mojokerto Didik Chusnul Yakin mengatakan, pihaknya telah menerjunkan tim dari Seksi Kefarmasian untuk mengevaluasi pengelolaan obat di Puskesmas Jetis. Tim tersebut sekaligus menelusuri penyebab salep kedaluwarsa masih ada di apotek puskesmas dan sampai ke tangan pasien "Itu terjadi karena keteledoran atau kurang telitinya petugas apotek Puskesmas Jetis dalam mengelola obat sehingga terselip salep kedaluwarsa. Dari 10 salep yang ada, 3 di antaranya kedaluwarsa kaka didik saat hubungi detik.com jumat (13/9/2019) menjelaskan, selama ini distribusi obat ke seluruh puskesmas di Kabupaten Mojokerto sudah melalui prosedur yang ketat. Saat pasokan obat dari gudang farmasi milik Dinkes tiba di puskesmas, petugas apotek wajib mencatat tanggal kedaluwarsa



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2020**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

dan kode batch masing-masing obat. Hal itu untuk memudahkan mengontrol obat-obatan yang sudah expired. Setiap obat yang sudah tak layak pakai karena kedaluwarsa wajib dikembalikan ke Dinkes Kabupaten Mojokerto untuk dimusnahkan.

"Kalau prosedur itu dilaksanakan dengan kerapian pencatatan dan penyimpanan, seharusnya tidak sampai ada obat kedaluwarsa. Didik juga menyayangkan sikap petugas apotek Puskesmas Jetis yang tidak langsung mengganti salep kedaluwarsa saat pasien melakukan komplain. Oknum apoteker tersebut justru menyuruh pasien menggunakan salep tidak layak pakai. Oleh sebab itu, pihaknya mengaku telah memerintahkan Kepala Puskesmas Jetis dr Dadang Hendryanto untuk membina si apoteker "Kepala Puskesmas sudah kami perintahkan untuk menegur dan melakukan pembinaan. Kasus ini juga menjadi pembelajaran bagi puskesmas yang lain supaya tidak sampai teledor dalam mengelola obat-obatan," tandasnya.

Sedangkan kasus yang terjadi di kabupaten sukabumi yang di kutip dari POJOKSATU.id kasus Ketidaksinkronnya antara Dinas Kesehatan dengan puskesmas mengenai kekosongan persediaan obat yang terjadi di sejumlah puskesmas di Kabupaten Sukabumi, menjadi sorotan tokoh masyarakat sekaligus mantan Anggota DPRD Kota Sukabumi. Salah satunya dilontarkan oleh Idod Juhandi. Dirinya menyayangkan puskesmas yang selama ini dipacu untuk secara maksimal dan optimal dalam pelayanan masyarakat, namun harus dipusingkan dengan kosongnya ketersediaan obat lidocain compositum (peringan rasa sakit).

Hal tersebut bisa diindikasikan lemahnya koordinasi antara kepala Dinas Kesehatan dan kepala puskesmas. "Harusnya kekosongan obat itu tidak terjadi, apalagi sampai dua bulan. Kalau pun alasannya karena penganggaran, itu tidak masuk akal. Kan ada perhitungan dengan acuan tahun sebelumnya," ujarnya.

Dirinya menilai yang lebih berkompeten dan bertanggung jawab terhadap persediaan dan pengadaan obat di puskesmas yaitu Dinas Kesehatan. Artinya,

walaupun puskesmas sudah diberikan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan, tetap saja yang memonitoring persediaan dan pengadaan obat adalah Dinas Kesehatan. "Tidak bijaksana kalau Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) tiba-tiba menyalahkan kepala puskesmas akibat kosongnya obat tersebut. Bagaimana pun, kepala Dinas Kesehatan yang tetap bertanggung jawab memonitoring persediaan obat, alat kesehatan, maupun alat kedokteran," katanya.

Menurut Idod, dana kapitasi itu tidak serta merta bisa digunakan untuk pengadaan obat-obatan karena

peruntukannya dialokasikan buat operasional juga. Kepala puskesmas tidak mau gegabah dalam membeli obat kalau nantinya bisa terjerat hukum, mereka pasti akan melakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. "Berdasarkan alur penganggaran, mestinya pengadaan obat-obatan sudah bisa diantisipasi dari awal. Kan ada evaluasi dan eksistensi. Jika saat ini tidak terjadi koordinasi dan komunikasi yang baik antara kadinkes dan kepala puskesmas, berarti memaksa warga untuk tidak bisa berobat," tegasnya.

Dari Permasalahan yang terjadi di atas, hal ini juga sesuai dengan apa yang terjadi pada Puskesmas Ciracap, Puskesmas Surade, dan Puskesmas buniwangi . Ada beberapa obat yang ketersediaannya masih kurang sehingga menjadi permasalahan yang cukup serius karena ketersediaan obat dengan kebutuhan itu tidak sesuai. Ketersediaan obat yang kurang dapat berpengaruh pada pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien menjadi kurang efektif. Barang yang datang dari Dinas Kesehatan biasanya terkadang jumlahnya tidak sesuai dengan apa yang puskesmas butuhkan, sehingga hal ini dapat menyebabkan kekosongan obat yang mengakibatkan kebutuhan pasien akan ketersediaan obat tidak terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari data persediaan obat di puskesmas Ciracap, Puskesmas Surade, Puskesmas Buniwangi yaitu sebagai berikut:

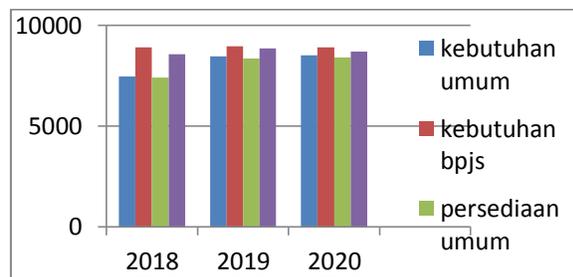


**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2020**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspittek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

Tabel 1.1 PUSKESMAS CIRACAP

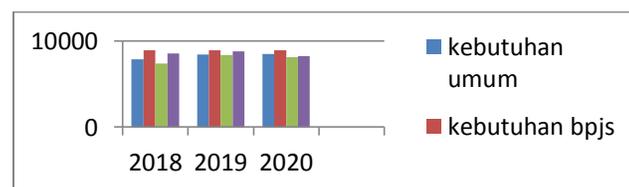
Tahun	Kebutuhan		Persediaan	
	Umum	BPJS	Umum	BPJS
2018	7460	8900	7400	8560
2019	8450	8950	8355	8850
2020	8500	8900	8400	8700



Gambar 1.1 Grafik Persediaan Obat Puskesmas Ciracap

Tabel 1.2 PUSKESMAS SURADE

Tahun	Kebutuhan		Persediaan	
	Umum	BPJS	Umum	BPJS
2018	8460	8900	8400	8560
2019	8460	8950	8300	8800
2020	8500	8900	8450	8890



Gambar 1.2 Grafik Persediaan Obat Puskesmas Surade

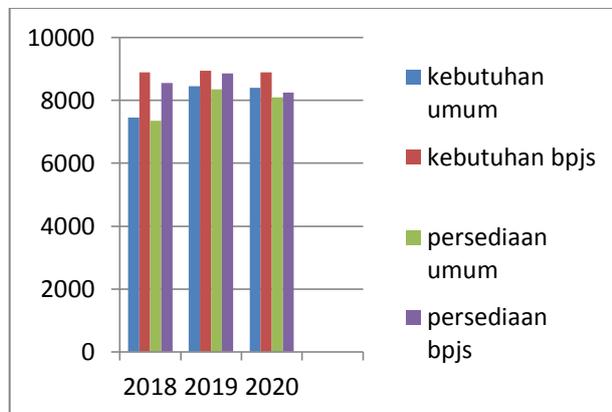


**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2020**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

**Tabel 1. 3 Persediaan Obat PUSKESMAS
BUNIWANGI**

Tahun	Kebutuhan		Persediaan	
	Umum	BPJS	Umum	BPJS
2018	7460	8900	7400	8560
2019	8450	8950	8355	8850
2020	8400	8900	8100	8250



**Gambar 1.3 Grafik Persediaan Obat Puskesmas
Buniwangi**

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa terdapat permasalahan yang terjadi mengenai persediaan obat untuk umum dan persediaan obat untuk BPJS yang ada di puskesmas Ciracap, Puskesmas Surade, dan puskesmas Buniwangi banyak sekali persediaan obat untuk umum dan persediaan obat untuk BPJS yang kurang seperti persediaan obat lebih sedikit di banding dengan realisasi kebutuhan persediaan obat yang seharusnya di miliki oleh puskesmas tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

Setiap perusahaan harus menggunakan sistem untuk mengatur kegiatan operasional perusahaan. Dengan menggunakan sistem yang baik, maka perusahaan bisa mencegah kecurangan-kecurangan yang akan terjadi. Salah satu sistem yang baik bagi perusahaan adalah sistem pengendalian internal.

Menurut Mulyadi (2017:129) sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian

dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengertian sistem pengendalian internal menurut Jason Scott (2014:226) adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian telah dicapai.

Sistem pengendalian internal menurut IAPI (2011:319.2) sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan entitas lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian dalam keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian sistem pengendalian internal menurut para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dibuat untuk memberikan jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada di dalam perusahaan.

Menurut Mulyadi (2017:130) unsur pokok sistem pengendalian internal ada 4 unsur, yaitu:

- a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.
- b. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.
- c. Praktik yang sehat. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah diterapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.
- d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian internal yang sangat penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum dan



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2020**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan.

Kegiatan pengawasan merupakan berbagai proses dan upaya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk menegakkan pengawasan atau pengendalian operasi perusahaan. *Committee of Sponsoring Organizations (COSO)* mengidentifikasi setidaknya-tidaknya ada lima hal yang dapat diterapkan oleh perusahaan, yaitu:

a. Pemberian otorisasi atas transaksi dan kegiatan.

Otorisasi dengan cara membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan dari atasan. Contoh: untuk meminta pergantian peralatan kantor maka bagian pembelian harus meminta persetujuan dari pimpinan dari bagian keuangan, persetujuan dari pimpinan keuangan itu dibuktikan dengan tanda tangan.

b. Pembagian tugas dan tanggung jawab.

Pembagian tugas dan tanggung jawab berdasarkan struktur organisasi yang telah dibuat perusahaan.

c. Rancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang baik.

Dokumen sebaiknya mudah dipakai oleh karyawan, dokumen dibuat dengan bahan yang berkualitas agar bertahan lama jika disimpan.

d. Perlindungan yang cukup terhadap kekayaan dan catatan perusahaan.

Perlindungan yang ketat ini meliputi:

- Antara peccatat dan pembawa kas harus berbeda orangnya.
- Tersedia tempat penyimpanan yang baik.
- Pembatasan akses ruang – ruang yang penting.

a. Pemeriksaan terhadap kinerja perusahaan.

Pemeriksaan kinerja ini dapat dilakukan dengan salah satu langkah berikut:

Membuat rekonsiliasi/pencocokan antara catatan perusahaan dengan bank, maupun rekonsiliasi antara dua catatan yang terpisah mengenai suatu rekening. Melakukan stok opname yaitu mencocokkan jumlah unit persediaan di gudang dengan catatan persediaan. Menjumlah berbagai hitungan dengan cara batch totals, yaitu penjumlahan dari atas ke bawah.

Menurut Sayuti Hasibuan (2000:3), sumber daya manusia adalah semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut.

Nawawi (2003:37) membagi pengertian SDM menjadi dua, yaitu pengertian secara makro dan mikro. Pengertian SDM secara makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah maupun belum memperoleh pekerjaan (lapangan kerja). Pengertian SDM dalam arti mikro secara sederhana adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dll.

Jadi, sumber daya manusia (SDM) adalah semua orang yang terlibat yang bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan.

Hasibuan (2002:12) membagi komponen SDM menjadi

- Pengusaha, ialah setiap orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh pendapatan dan besarnya pendapatan itu tidak menentu tergantung pada laba yang dicapai perusahaan tersebut.

- Karyawan, ialah penjual jasa (pikiran dan tenaganya) untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan dan berhak memperoleh kompensasi yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu (sesuai perjanjian). Posisi karyawan dalam suatu perusahaan dibedakan menjadi :

a. Karyawan Operasional, ialah setiap orang yang secara langsung harus mengerjakan sendiri pekerjaannya sesuai dengan perintah atasan.

b. Karyawan Manajerial, ialah setiap orang yang berhak memerintah bawahannya untuk mengerjakan sebagian pekerjaannya dan dikerjakan sesuai dengan perintah.

- Pemimpin, ialah seseorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai suatu tujuan.



SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III UNIVERSITAS PAMULANG TAHUN 2020

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten

ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

Menurut Sayuti Hasibuan (2000:1), pengelolaan sumber daya manusia berarti penyiapan dan pelaksanaan suatu rencana yang terkoordinasi untuk menjamin bahwa sumber daya manusia yang ada dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

Menurut Hasibuan (2002:29), analisis pekerjaan atau *job analysis* adalah informasi tertulis mengenai pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar tujuan tercapai. Aktivitas dalam analisa pekerjaan adalah menganalisis dan mendesain pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya,

dan mengapa pekerjaan itu harus dikerjakan. Analisa pekerjaan menghasilkan uraian pekerjaan (*job description*) dan spesifikasi pekerjaan (*job specification*) yang berguna untuk aktivitas pengelolaan SDM selanjutnya.

Uraian pekerjaan (Hasibuan, 2002:33) adalah informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi.

Sedangkan spesifikasi pekerjaan (Hasibuan, 2002:34) adalah uraian persyaratan kualitas minimum orang yang bisa diterima agar dapat menjalankan satu jabatan dengan baik dan kompeten.

Menurut Hasibuan (2002:250), perencanaan SDM adalah merencanakan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan.

Definisi perencanaan SDM menurut Nawawi (2003,43) adalah rangkaian kegiatan peramalan kebutuhan atau permintaan tenaga kerja di masa depan pada sebuah organisasi/perusahaan, yang mencakup pendayagunaan SDM yang sudah ada dan pengadaan tenaga kerja baru yang dibutuhkan.

Jadi, perencanaan sumber daya manusia adalah proses menetapkan estimasi atau perkiraan untuk memperoleh sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan organisasi sekarang dan pengembangannya di masa depan.

1. Metode Penelitian

Objek Penelitian

Sugiyono (2017: 38) menyatakan bahwa “objek penelitian adalah atribut atau sifat dari nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Berdasarkan pengertian diatas maka yang menjadi objek penelitian ini adalah analisis sistem pengendalian internal terhadap persediaan obat. Dengan demikian peneliti melakukan penelitian di puskesmas, adapun tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian internal persediaan obat.

Metode Penelitian

Sugiyono (2017: 2) menyatakan bahwa “metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan buktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah”.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan permasalahan yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder..

Sampel Sumber data

Menurut Sugiyono dalam bukunya (2017:215) dalam metode penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh *Spardley* dinamakan “*social situation*” atau situasi social yang terdiri atas tiga elemen yaitu : tempat (*place*), pelaku (*actory*), dan aktivitas (*activity*).

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi social yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman, dan guru. Dalam penelitian ini yang menjadi informan nya adalah perusahaan, manajemen, dan karyawan.

Menurut Sugiyono (2017: 216) pada penelitian kualitatif peneliti memasuki situasi social tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi tersebut. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Hasil penelitian tidak akan digeneralisasikan ke populasi, karena pengambilan sampel tidak diambil secara random.



SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III UNIVERSITAS PAMULANG TAHUN 2020

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

Uji Keabsahan data

Sugiyono (2017: 267) uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas, dalam penelitian kualitatif kriteria utama terhadap data penelitian adalah valid, reliabel, dan objektif. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat di laporkan oleh peneliti, adapun dalam penelitian ini uji keabsahan data yang di gunakan adalah :

Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan beberapa proses yaitu :

Perpanjangan Pengamatan

Sugiyono (2017 : 270) dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan , melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui dilapangan maupun yang baru. Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah di peroleh.

Meningkatkan Ketekunan

Sugiyono dalam bukunya (2017: 272). Menyatakan bahwa meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Cara tersebut makan kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

Triangulasi

Sugiyono dalam bukunya (2017: 273), triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dari berbagai waktu.

Menggunakan Bahan Referensi

Sugiyono (2017: 275) bahan referensi disini adalah adanya bahan pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Seperti data hasil wawancara, foto dan video yang mendukung kredibilitas data yang telah dilakukan oleh peneliti.

Menggunakan membercheck

Sugiyono (2017:276) membercheck adalah proses pengecekan data yang telah diperoleh oleh peneliti kepada pemberi data, untuk mengetahui seberapa jauh data yang di peroleh sesuai dengan

yang diberikan oleh pemberi data.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang akurat. Data primer diperoleh dengan cara :

Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi persediaan pada perusahaan.

Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara dilakukan dengan tanya jawab/ dialog kepada orang-orang yang dianggap ada hubungannya dengan masalah yang akan di teliti. Wawancara dapat dilakukan dengan cara secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka atau melalui telepon.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi literatur/ studi kepustakaan dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelaah jurnal yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

Teknik Analisis Data

Sugiyono dalam bukunya (2017: 243), dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh

Sugiyono menyatakan bahwa “analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa,



SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III UNIVERSITAS PAMULANG TAHUN 2020

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif.

Analisis Sebelum Dilapangan

Sugiyono (2017: 245), penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang kan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk ke lapangan.

Analisis Selama dan Setelah di lapangan

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari informan. Apabila jawaban yang di wawancarai setelah di analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melakukan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data yang kredibel.

Secara umum penelitian kualitatif dalam melakukan analisis data banyak menggunakan model analisis yang di cetuskan oleh Miles dan Huberman yang sering disebut dengan metode analisis interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam data kualitatif ada tiga, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/ verifikasi.

Reduksi Data

Sugiyono (2017: 247) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer, laptop, dan yang lain sebagainya.

Penyajian Data (data display)

Sugiyono (2017: 249) setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa

dilakukan dalam bentuk uraian singkatat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. Menurut Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Kesimpulan dan Verifikasi (conclusion drawing/ verification)

Sugiyono (2017: 252) kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pengendalian Internal dan persediaan obat

Setiap perusahaan harus menggunakan sistem untuk mengatur kegiatan operasional perusahaan. Dengan menggunakan sistem yang baik, maka perusahaan bisa mencegah kecurangan-kecurangan yang akan terjadi. Salah satu sistem yang baik bagi perusahaan adalah sistem pengendalian internal.

Menurut Mulyadi (2017:129) sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengertian sistem pengendalian internal menurut Jason Scott (2014:226) adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian telah dicapai.

Persediaan obat sangatlah penting dalam suatu puskesmas. Menurut Heizer dan Render (2014) semua organisasi tentunya memiliki sistem perencanaan dan sistem pengendalian persediaan. Persediaan merupakan asset termahal dari sebuah perusahaan, persediaan dapat mewakili 50% dari keseluruhan modal yang diinvestasikan. Menurut manager di seluruh dunia pengelolaan persediaan yang baik sangat penting. Adanya manajemen persediaan secara ilmiah merupakan suatu upaya



SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III UNIVERSITAS PAMULANG TAHUN 2020

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

dalam keberhasilan terapi kepada pasien selain juga tercapainya penggunaan sumber daya secara bijaksana (Anand, 2013). Disatu sisi perusahaan akan berusaha mengurangi biaya dengan mengurangi jumlah persediaan. Tetapi disisi yang lain tanpa adanya persediaan sebuah perusahaan tidak dapat berjalan dan dapat terhenti proses produksinya dan konsumen menjadi kecewa saat barang tidak tersedia. Oleh karena alasan inilah manajer operasional bertugas untuk menyeimbangkan kedua sisi tersebut

4.1.1 Pelaksanaan Sistem Persediaan Pada Puskesmas

Pada dasarnya sistem informasi akuntansi merupakan gabungan antara Suatu data dan manusia. Sistem informasi akuntansi atau SIA ialah merupakan salah satu implementasi dari sebuah sistem informasi manajemen yang mana sangat berhubungan dengan kegiatan akuntansi dan juga perhitungan

Menurut Mulyadi (2001:2,5) Sistem adalah "sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu". Sistem juga dapat dikatakan sebagai "suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan". Sedangkan "Sistem akuntansi merupakan organisasi, formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan yang mana dibutuhkan oleh seorang manajemen guna memudahkan dalam mengelola manajemen perusahaan" (Mulyadi, 2001:3).

Prosedur adalah "suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang" (Mulyadi, 2001:5).

Pengadaan adalah "kegiatan untuk mendapatkan suatu barang ataupun jasa secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya" (Weele, 2010)

Persediaan adalah merupakan satu pos yang sangat penting bagi banyak perusahaan karena pos tersebut secara material dapat mempengaruhi perhitungan laba rugi dan neraca. Penjualan persediaan pada harga yang lebih tinggi dari total harga pokok merupakan sumber utama bagi

perusahaan. Menurut F. Robert Jacobs dan Richard B. Chase (2015) persediaan adalah "persediaan berbagai jenis barang atau sumber daya yang digunakan dalam suatu organisasi".

Penerapan pelaksanaan sistem dan prosedur pengadaan obat-obatan di puskesmas ciracap kecamatan ciracap kabupaten sukabumi berdasarkan hasil penelitian sudah sesuai akan tetapi masih banyak kekurangan didalam melakukan sistem dan prosedur yang sesuai dengan SOP puskesmas. Hal itu bisa di lihat dari:

1. Sistem dan prosedur pengadaan sudah dilakukan akan tetapi pelaksanaannya masi di lakukan dengan satu orang (merangkap)
2. masih ada nya kekurangan obat yang mengakibatkan pasien harus membeli obat dari luar
3. kurangnya pengontrolan di dalam mekanisme pelaksanaan sistem dan prosedur pengadaan obat-obatan

4.1.2 Pelaksanaan sistem pengendalian internal pada Puskesmas Ciracap

1. Perencanaan dan Penentuan Kebutuhan Persediaan Pada Puskesmas Ciracap

Pada dasarnya obat merupakan suatu sarana penunjang medis yang paling penting dan untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan yang diperlukan, harus selalu di perhatikan dengan baik. Maka hal ini di lakukan karena perputaran obat-obatan pada puskesmas terjadi sangat cepat dan kebutuhan obat sangat sulit ditentukan secara pasti. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu perencanaan dan penentuan kebutuhan obat-obatan yang baik dengan cara memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Salahsatu Tujuan dari pelaksanaan perencanaan dalam menentukan kebutuhan obat-obatan tersebut ialah dengan terlaksananya suatu kejelasan dan berjalan lancar sistem di dalam unsur perbekalan farmasi, telah dilaksanakannya aktifitas monitoring serta pengendalian terhadap obat-obatan. Selain itu cara untuk menghindari dari terjadi masalah kekosongan stok obat pada gudang farmasi, sehingga kebutuhan akan obat pada puskesmas dapat di penuhi dengan baik.

Salah satu perencanaan dan penentuan kebutuhan obat-obatan pada puskesmas ciracap merupakan salah satu tanggung jawab dari bagian gudang. Diantar rencana yang telah dilakukan yaitu meliputi pengumpulan suatu laporan dari pihak



SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2020

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

gudang tentang jumlah dan jenis-jenis persediaan obat yang di perlukan, dan melakukan pertimbangan pada dana yang disediakan, serta memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Maka hasil dari rekapitulasi yang telah masuk ini akan digunakan sebagai

Salah satu pedoman dalam perencanaan dan penentuan suatu kebutuhan yang akan dilakukan di antaranya memerlukan beberapa tahapan-tahapan yang akan di lalui untuk memenuhi semua kebutuhan yang akan di rencanakan di sebuah Puskesmas.

Tahapan – tahapan tersebut di jelaskan antara lain ialah sebagai berikut ini:



Dari gambar 4.2 di atas disimpulkan bahwa pihak gudang akan merencanakan kebutuhan dengan cara beberapa tahapan- tahapan yaitu:

- Tahapan Pemilih Obat**
Tahapan ini dilakukan untuk memilih obat-obatan berdasarkan jenis obat nya dan memperhatikan pola penyakit, pola konsumsi, pola budaya, serta pola kemampuan masyarakat di dalam kebutuhan nya.
- Tahapan Kompilasi Pemakaian Obat**
Tahap kompilasi pemakaian obat ini dilakukan untuk merekapitulasi data pemakaian obat di dalam unit pelayanan kesehatan yang bersumber dari sebuah laporan pemakaian dan lembar permintaan obat (LPLPO)
- Tahap Perhitungan Kebutuhan Obat**

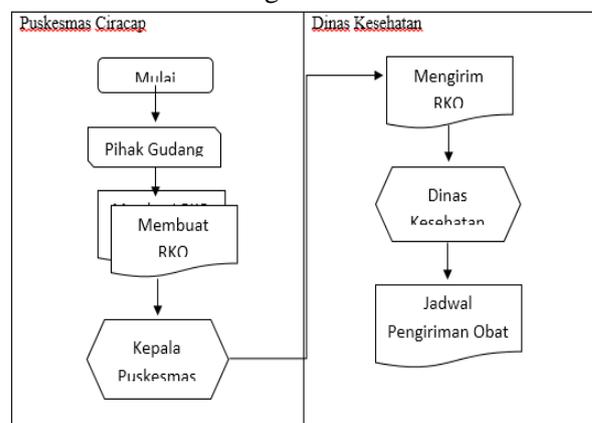
Tahap perhitungan kebutuhan obat dilakukan guna untuk menghitung kebutuhan obat di suatu puskesmas, dengan menggunakan metode konsumsi analisis trend pemakaian obat tiga tahun sebelumnya atau lebih, dan menggunakan metode morbiditas yaitu menghitung kebutuhan obat berdasarkan pola penyakit.

- Tahap Proyeksi Kebutuhan Obat**
Tahap proyeksi kebutuhan ialah tahap perhitungan yang dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan data pemakaian obat dan jumlah sisa stok obat pada periode waktu yang masih berjalan
- Obat Yang di Butuhkan**
Setelah semua tahapan-tahan di lakukan maka perencanaan obat sudah bisa di pastikan seberapa banyak obat yang dibutuhkan dan obat apa saja yang harus segera di adakan,

2. Pengadaan Obat di Puskesmas

Pada dasarnya pengadaan obat merupakan kegiatan pembelian yang meliputi suatu pemesanan, penerimaan dan pembayaran obat-obatan. Maka tujuan dari pengadaan obat-obatan Pada dasarnya ialah untuk memenuhi semua kebutuhan perbekalan persediaan agar tidak kosong. Pembelian obat ini akan dilakukan baik secara tunai ataupun secara kredit. Dan pengadaan obat-obatan selalu dilakukan oleh bagian gudang. Pembayaran obat-obatan ini dilakukan oleh bagian gudang dengan mendapatkan persetujuan dari kepala puskesmas, hal tersebut di karenakan semua keuangan untuk kebutuhan pengadaan persediaan obat seutuhnya di pegang dan dikelola oleh bagian gudang sendiri.

Adapun uraian prosedur kegiatan pengadaan obat-obatan ialah sebagai berikut :





SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III UNIVERSITAS PAMULANG TAHUN 2020

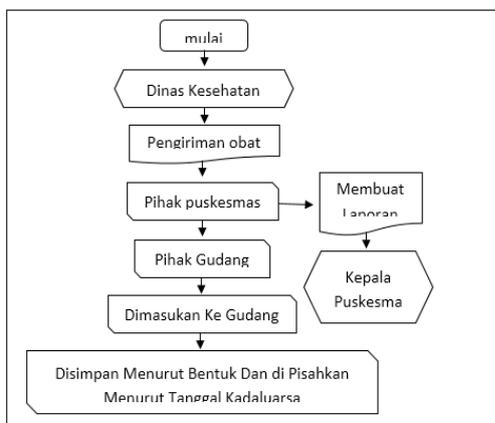
Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

Dari gambar 4.3 di atas di jelaskan bahwa hal pertama yang dilakukan dalam melakukan pengadaan obat ialah pertama pihak puskesmas memulainya dari pihak gudang dengan membuat dua lembar surat rencana kebutuhan obat (RKO) yang akan di serahkan ke kepala puskesmas. Setu lembar surat rencana kebutuhan obat (RKO) di simpan di puskesmas dan satu lembar rencana kebutuhan obat (RKO) di serahkan ke Dinas Kesehatan untuk di ajukan tentang obat yang di butuhkan. Pihak Dinas Kesehatan lalu membuat jadwal pengiriman untuk obat yang siap kirim.

3. Penerimaan obat pada puskesmas ciracap

Sedangkan penerimaan obat merupakan suatu kegiatan yang berguna untuk memastikan kesesuaian kedatangan barang dengan surat yang telah di pesan di dam kesesuaian jenis obat ataupun jumlah obat yang telah di pesan. Didalam penerimaan ini obat akan di sesuaikan jenis spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam surat pesanan dengan kondisi fisiknya yang telah diterima. Dan adapun uraian penerimaan obat di puskesmas ciracap sebagai berikut:

Gambar 4. Penerimaan Obat



Dari gambar 4.4 tersebut di jelaskan bahwa pertama pihak Dinas kesehatan melakukan pengiriman obat ke pihak Puskesmas. Setelah obat di terima oleh pihak puskesmas, lalu pihak puskesmas membuat laporan untuk di serahkan kepada

puskesmas. Sesudah itu lalu obat di berikan ke pihak gudang untuk pengecekan. Maka selesai di cek obat akan dimasukkan ke gudang dan di simpan menurut bentuk serta menurut tanggal kadaluarsa obat itu sendiri

4. Penyimpanan

Dengan adanya penyimpanan obat ini bertujuan untuk menjamin atau memastikan mutu dan keamanan obat-obatan juga haal itu di lakukan supaya untuk mempercepat atau mempermudah pelayanan. Selain itu juga penyimpanan bertujuan untuk menghindari penggunaan obat-obatan yang tidak diinginkan, memudahkan pencarian obat-obatan, serta digunakan untuk pengawasan obat. Untuk melaksanakan penyimpanan obat-obatan pada puskesmas ciracap akan dilakukan oleh staf gudang. Untuk menjaga kualitas dan kondisi persediaan obata- obatan, maka penyimpanan dilakukan sesuai dengan standar yang ada di puskesmas sebagai berikut :

1. Tempat ruangan penyimpanan harus memenuhi persyaratan kefarmasian :
 - Bersih
 - Tidak lembab
 - Sirkulasi udara baik
 - Terang
 - Tidak ada binatang seperti tikus, kecoa, semut
 - Tidak panas dan pengap
2. Obat tertentu harus disimpan pada suhu 2°-8°C (lemari es).
3. Obat narkotika harus disimpan terpisah di dalam lemari berkunci, berpintu ganda dan kuncinyadisimpan oleh penanggung jawab obat.
4. Obat tanpa kondisi khusus disimpan di rak atau lemari obat.
5. Ruang penyimpanan obat/alkes dikelompokkan berdasarkan sumber anggaran.
6. Obat disusun menurut jenisnya , selanjutnya menurut abjad.
7. Untuk cairan harus diletakkan di atas palet dan maksimal 8 susun.
8. Obat harus diletakkan sedemikian rapi, teratur, mudah dicari sehingga obat harus dapat ditemukan dengan cepat dan tepat.

Untuk penyimpanan obat-obatan yang ada di puskesmas di bagian gudang harus dengan perbekalan farmasi. Pada umumnya hal itu dilakukan



SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III UNIVERSITAS PAMULANG TAHUN 2020

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

dengan menggunakan sistem *FIFO* (*Firs In Firs Out*, yaitu dengan metode mengeluarkan obat-obatan yang datang terlebih dahulu. Penyimpanan obat-obatan yang dilakukan oleh bagian gudang dengan perbekalan farmasi menggunakan kartu persediaan atau biasa disebut kartu stelling. Kartu ini akan dicantumkan atau ditaruh pada masing-masing obat. Dengan kartu tersebut pihak gudang akan lebih mudah untuk memantau jumlah persediaan obat-obatan yang telah keluar masuk gudang.

Pada saat obat-obat sudah mencapai enam bulan maka obat-obatan yang telah mendekati tanggal kadaluwarsa akan ditaruh di rak yang sudah disendirikan. Obat-obatan yang telah mendekati kadaluwarsa ini secepatnya harus di tukarkan dengan obat-obatan yang baru. Sedangkan untuk obat –obat yang tidak dapat ditukarkan akan di konsultasikan kepada para dokter dan pihak farmasi supaya lebih cepat digunakan.

4.1.3 Kendala Dalam Melaksanakan Sistem dan Di Puskesmas Ciracap

Krismiaji (2015: 16) telah mengungkapkan bahwa “sistem informasi akuntansi adalah cara-cara yang di organisasikan untuk mengumpulkan, memasukan dan mengolah serta menyimpan data, dan cara-cara yang di organisasikan untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan dan melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang di tetapkan”.

Di setiap perusahaan pasti memiliki kendala dan kesulitan pada bidang masing-masing. Begitu pula di puskesmas ciracap di dalam melaksanakan sistem dan prosaedur pengadaan persediaan obat-obatan pasti memiliki kendala tertentu yang di hadapi pihak puskesmas, seperti yang telah di ungkapkan oleh Romney & Steinbart (2007: 11) bahwa “sistem informasi akuntansi memiliki 6 komponen yaitu:

1. Orang yang menggunakan sistem
2. Prosedur dan intruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses dan menyimpan data
3. Data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya
4. Perangkat lunak yang di gunakan untuk mengolah data
5. Infrasetruktur teknologi informasi, meliputi kompeter, perangkat periperual, dan perangkat jaringan

6. Pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data sistem informasi akuntansi”.

Hasil penelitian yang telah di lakukan pada puskesmas ciracap bahwa: puskesmas ciracap masih belum menerapkan sistem informasi akuntansi pada persediaan obat karena dinas belum ada secara kedinasan. Hal itu bisa dilihat dari:

1. Orang yang menggunakan sistem sumberdayanya kurang dan masih ada orang yang masih berpendidikan rendah (SMP)
2. Prosedur dan intruksi yang di gunakan untuk mengumpulkan, memproses dan menyimpan data masih dilakukan oleh satu orang (merangkap)
3. Perangkat lunak / sofwer yang di gunakan untuk mengelola data yang seharusnya bisa mempermudah bagi puskesmas belum di gunakan dengan maksimal
4. Infrastruktur masig dalam tahap pembangunan.

Dan seperti yang telah di jelaskan di atas bahwa apabila di antara enam komponen itu salahsatunya belum terpenuhi maka suatu sistem tidak bisa berjalan dengan baik dan oftimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan terhadap pengaruh sistem pengendalian internal dan sumber daya manusia terhadap persediaan obat, serta berdasarkan teori yang mendasari penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

4. pada dasarnya pelaksanaan penerapan sistem pengendalian internal dan prosedur pengadaan obat-obatan di puskesmas sudah berjalan dengan baik dan efektif halitu bisa diliat dari
 - Perencanaan dan penentuan kebutuhan selalu di lakukan
 - Pengadaan obat selalu di lakukan dengan baik dan puskesmas selalu membuat RKO di dalam melakukan pengadaan
 - Penerimaan obat selau di cek langsung dan selalu membuat laporan
 - Penyimpanan selalu di lakukan di tempat yang memenuhi persyaratan
 - Pendistribusian selalu berjalan baik melalui puskesmas langsung maupun lewat posyandu/pustu
 - Penghapusan terhadap obat kadaluarsa/rusak



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2020**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

- selalu dilakukan
- Perhitungan fisik persediaan selalu rutin dilakukan satu bulan sekali
5. Penerapan pelaksanaan sistem dan prosedur pengadaan obat-obatan di puskesmas ciracap kecamatan ciracap kabupaten sukabumi berdasarkan hasil penelitian sudah sesuai akan tetapi masih banyak kekurangan didalam melakukan sistem dan prosedur yang sesuai dengan SOP puskesmas. Hal itu bisa dilihat dari:
- Sistem dan prosedur pengadaan sudah dilakukan akan tetapi pelaksanaannya masih dilakukan dengan satu orang (merangkap)
 - masih ada nya kekurangan obat yang mengakibatkan pasien harus membeli obat dari luar
 - kurangnya pengontrolan di dalam mekanisme pelaksanaan sistem dan prosedur pengadaan obat-obatan
6. Dari sistem dan prosedur akuntansi persediaan obat-obatan yang berlaku pada puskesmas ciracap masih ditemukan beberapa kecurangan atau kendala yang dapat merugikan puskesmas ciracap. Permasalahan yang dihadapi meliputi :
- Orang yang menggunakan sistem sumberdayanya kurang dan masih ada orang yang masih berpendidikan rendah (SMP)
 - Prosedur dan intruksi yang di gunakan untuk mengumpulkan, memproses dan menyimpan data masih dilakukan oleh satu orang (merangkap)
 - Perangkat lunak / sofwer yang di gunakan untuk mengelola data yang seharusnya bisa mempermudah bagi puskesmas belum di gunakan dengan maksimal
 - Infrastruktur masih dalam tahap pembangunan.

REFERENSI

Aji, R. P. (2013). *Analisis Implementasi Sistem Informasi Pengadaan Obat Pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit (Studi Pada Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang)*. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 6(1).

DETIKNEW, (12 september 2019) *Puskesmas di Mojokerto beri salep kadaluarsa*. Di akses pada 12 september 2019 dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4704298/ini-dalih-puskesmas-di-mojokerto-beri-pasien-salep-kedaluwarsa>

F. Robert Jacobs & Richard B. Chase (2015) *Pengertian persediaan-website*.

Gustriansyah, R., Antony, F., & Suhandi, N. (2018). *PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN PERSEDIAAN OBAT DI PUSKESMAS UNTUK MENGOPTIMALKAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT*. *Jurnal Abdimas Mandiri*, 1(1)

Juvita Ajeng Arliyati, 2018. *pengaruh sistem informasi akuntansi persediaan bahan baku dan pengendalian internal persediaan bahan baku terhadap efektivitas persediaan bahan baku*

Mufidah. 2017. *pengaruh pengendalian internal persediaan dan sistem informasi akuntansi terhadap upaya pencegahan kecurangan (FRAUD) dalam pengelolaan persediaan pada pt mitra jambi utama*

Mukaromah, A. (2013, October). *Analisis Sistem Akuntansi Persediaan Obat-Obatan untuk Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Intern pada RSUD Kota Madiun*. In *FIPA: Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi (Vol. 1, No. 2)*.

Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Edisi Tiga. Jakarta: Salemba Empat

Pengertian, fungsi dan kegiatan puskesmas. 2015. *Pengertian puskesmas*

POJOKSATU.id,(31 mei 2015) *obat di puskesmas kosong diskus harus tanggung jawab*.di akses pada 1 juni 2015,dari

SAK 2007: 14.1. *Edisi Dua*. Jakarta: Salemba Empat

Sugiono. 2016. *Metode Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: ALFABETA Bandung.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian*.Cetakan ke 25. Bandung: Alfabeta

Weele. (2010)*kegiatan untuk mendapatkan suatu*



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2020**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

*barang ataupun jasa secara transparan,
efektif dan efisien sesuai dengan
kebutuhan dan keinginan penggunanya.*

Zuhri, S. (2015). *SISTEM INVENTORY OBAT PADA
PUSKESMAS SUKOREJO. DINAMIKA
INFORMATIKA – Vol.5 No. 1, Maret, 8
halaman. Tersedia:
q=cache:fOQIoc4p_0YJ:scholar.google.com*